



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 21 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN AGAMA
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MUJIBURRAHMAN
2. Jabatan : REKTOR
3. NHK : 872905

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **5.486.900.000**

1. Tanah Seluas 1.953 m2 di KAB / KOTA ACEH BESAR, HASIL SENDIRI Rp. 170.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 800 m2/200 m2 di KAB / KOTA KOTA BANDA ACEH , HASIL SENDIRI Rp. 1.400.000.000
3. Tanah Seluas 271 m2 di KAB / KOTA ACEH BESAR, HASIL SENDIRI Rp. 275.000.000
4. Tanah Seluas 855 m2 di KAB / KOTA ACEH BESAR, HASIL SENDIRI Rp. 110.500.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 400 m2/200 m2 di KAB / KOTA KOTA BANDA ACEH , HASIL SENDIRI Rp. 1.200.000.000
6. Tanah Seluas 1078 m2 di KAB / KOTA ACEH BESAR, HASIL SENDIRI Rp. 875.000.000
7. Tanah Seluas 1000 m2 di KAB / KOTA ACEH BESAR, HASIL SENDIRI Rp. 125.000.000
8. Tanah Seluas 2564 m2 di KAB / KOTA ACEH BESAR, HASIL SENDIRI Rp. 230.000.000
9. Tanah dan Bangunan Seluas 150 m2/60 m2 di KAB / KOTA ACEH BESAR, HASIL SENDIRI Rp. 215.000.000
10. Tanah Seluas 656 m2 di KAB / KOTA ACEH BESAR, HASIL SENDIRI Rp. 560.900.000
11. Tanah Seluas 649 m2 di KAB / KOTA ACEH BESAR, HASIL



SENDIRI Rp. 325.500.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp.

212.500.000

1. MOBIL, KIJANG INNOVA MNIBUS Tahun 2018, HASIL SENDIRI

Rp. 210.000.000

2. MOTOR, HONDA NF 100 TD Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp.

2.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp.

267.500.000

D. SURAT BERHARGA

Rp.

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp.

683.707.755

F. HARTA LAINNYA

Rp.

Sub Total

Rp.

6.650.607.755

III. HUTANG

Rp.

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

6.650.607.755

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.